

**RINGKASAN LAPORAN PENELITIAN**  
**PENELITIAN UNGGULAN NASIONAL**  
**DISKURSUS NOMENTKLATUR GELAR AKADEMIK DI PTKI**



**Tim Peneliti :**

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

Dr. Sinngih Basuki, MA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN**  
**KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2019**

# Diskursus Nomentklatur Gelar Akademik di PTKI

## Latar Belakang

Gelar Akademik atau yang sering juga disebut *titel* (Bhs. Belanda, dari Bahasa Latin: *Titulus*) bukan sekedar tanda pencapaian seseorang dalam bidang keilmuan tertentu, namun secara pragmatis juga merupakan piranti penting bagi yang bersangkutan untuk bersaing di dunia kerja dan jabatan. Gelar akademik yang dimunculkan berupa singkatan beberapa huruf di depan atau belakang nama, menjadi sebuah *shortcut* untuk identifikasi dini secara pasti perihal bidang keahlian seseorang. Di Indonesia, mayoritas masyarakat masih gandrung dan gemar dengan gelar akademik apa pun. Kepemimpinan sebuah perguruan tinggi misalnya juga masih ditandai dengan gelar-gelar tertentu yang belum tentu mencerminkan *leadership* seseorang. Di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (tingkat universitas khususnya) masih mengedepankan gelar Profesor, sementara, di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, jika terjadi persaingan kandidat antara yang bergerlar Magister dan Doktor, sivitas akademiknya lebih cenderung memilih yang bergerlar Doktor,.

Namun demikian, secara empirik, gelar akademik juga dapat menjadi kontraproduktif jika keberadaannya menimbulkan dikotomi. Sama-sama ahli pendidikan, bertitel S.Pd dengan S.Pd.I tentu berbeda. Gelar S.Pd menyiratkan bahwa yang bersangkutan adalah ahli pendidikan. Hal tersebut berarti bahwa penyandang gelar bisa berkiprah di segala jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan S.Pd.I (dengan tambahan I/Islam) bagi orang awam bisa dimaknai sebagai gelar ahli pendidikan dengan beberapa kekhususan, misalnya: 1) ahli pendidikan, khusus model pendidikan Islam seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren, sehingga dikhawatirkan tidak mampu bekerja di lembaga pendidikan yang netral atau bahkan lembaga pendidikan non-muslim; atau 2) ahli pendidikan, tapi dididik secara Islami

oleh perguruan tinggi agama Islam, sehingga tidak cocok untuk bekerja di lingkungan yang “kurang Islami” misalnya sekolah negeri atau sekolah Kristen; dan 3) ahli pendidikan, tapi keahliannya khusus keterampilan mengajar dengan metode Islami, sehingga dikhawatirkan tidak piawai mengajar secara netral, tanpa bias, atau tidak mampu mengajar dengan pendekatan pendidikan kontemporer; dan terakhir 4) ahli pendidikan, tapi bervisi menyebarkan ajaran Islam sehingga rentan mempengaruhi siswa dari agama lain untuk tertarik kepada Islam. Tentu empat anggapan tersebut tidak benar adanya, namun jika sebuah anggapan sudah menjadi asumsi umum dan bersifat massif, tidak elok pula jika diacuhkan begitu saja.

Gelar yang memunculkan asumsi bias di kalangan *user* tersebut berkontribusi negatif terhadap penyerapan alumni perguruan tinggi keagamaan Islam di pasar kerja. Lembaga-lembaga yang menjaga iklim netralitas dan anti bias menjadi ragu-ragu untuk merekrut sarjana dengan embel-embel “I” pada titelnya. Akibatnya bisa diprediksi, sarjana lulusan PTKI menjadi kurang *marketable* karena pasar kerjanya seolah terbatas pada lembaga-lembaga Islam. Bahkan tidak jarang, sarjana dengan titel keislaman mendapatkan perlakuan diskriminatif selama dalam proses melamar pekerjaan. Untuk kasus ini sebenarnya bisa ditelisik secara filosofis, sebenarnya siapa yang membuat alumni PTKI terdiskriminasi: apakah pasar kerja yang diskriminatif atau justru PTKI yang membekali sarjana dengan titel yang sedari awal memang sudah diskriminatif (?). Jika jawaban yang kedua dianggap benar, maka, terjawab sudah mengapa alumni PTKI kurang *marketable*.

Rentetan ekses lainnya, kesan “kurang laku” ini dapat berimbas pada citra perguruan tinggi. Banyak calon mahasiswa potensial yang akhirnya memilih ke perguruan tinggi umum wasta (PTUS) setelah dinyatakan tidak diterima di perguruan tinggi umum negeri (PTUN). Artinya, perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) adalah opsi ketiga setelah PTUN dan PTUS. Semua lembaga pendidikan tinggi tentu berhak berharap untuk menjadi opsi pertama bagi bibit-bibit unggul alumni SLTA, tidak terkecuali PTKI. Mungkin

selamanya PTKI tetap akan menjadi opsi ketiga jika gelar akademik yang disematkan pada lulusannya masih bias. Dari pemaparan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemberian tambahan “I” (Islam) pada titel akademik lulusan PTKI justru membatasi ruang gerak alumni untuk bersaing di dunia kerja. Realitas ini sebenarnya sudah menjadi alasan yang cukup untuk mempertimbangkan perlunya penghapusan huruf I dari setiap gelar akademik lulusan PTKI.

Paparan demikian tidak bermaksud menyalahkan sistem penyematian gelar yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut. Dapat dimaklumi bahwa penambahan huruf I dalam gelar tersebut sudah sesuai semangat zamannya. Seperti diketahui bahwa semangat kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) juga ditandai oleh santernya upaya Islamisasi ilmu. Semua cabang ilmu modern yang *notabene* berkembang dari Barat nan sekuler dicoba untuk “diislamkan” sehingga semua disiplin ilmu kemudian bertambah predikat Islam; seperti Ekonomi Islam, Pendidikan Islam, Teologi Islam, Psikologi Islam, dan sederet nama serupa. Hal tersebut merembet pada penamaan *outputnya* sehingga gelar akademik pun mengalami Islamisasi, terutama jika dihasilkan dari sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam. Dengan demikian, adanya gelar S.Pd.I, S.Sos.I, S.Th.I, dan seterusnya adalah realitas yang wajar sesuai semangat Islamisasi ilmu. Namun, untuk konteks kekinian, sepertinya hal tersebut perlu ditinjau ulang terutama karena semangat zaman yang berubah.

Saat ini, “Islamisasi ilmu” sudah menjadi wacana yang *out of date* sebab telah berganti dengan - meminjam istilah Kuntowijoyo - “saintifikasi/ pengilmuan Islam”. Artinya, kekayaan nilai dan tradisi Islam harus didaratkan menjadi sebuah perangkat yang netral dan bisa dibebas-pakaikan oleh semua kalangan tanpa memandang agama. Oleh karena itu, di zaman yang mengarah pada penghargaan *multiculturalism* ini, klaim dan okupasi agama tidak lagi menarik bagi publik terutama *user* di pasar kerja, apalagi pasar kerja internasional yang super sensitif dengan bias. Pasar kerja modern merekrut tenaga kerja hanya berdasarkan prinsip meritokrasi di mana

seseorang direkrut berdasarkan kepiawaian keilmuannya, bukan berdasarkan dari mana ia berasal dan tradisi apa yang ia anut. Oleh karena itu, gelar akademik seyogyanya lebih menegaskan aspek “keterampilan-keilmuan” ketimbang aspek “asal-usul tradisi”nya. Dengan kata lain, gelar kesarjanaan seharusnya cukup mencerminkan keilmuannya tanpa harus melibatkan tradisi agamanya.

Permasalahan lain terkait gelar akademik di lingkungan Kementerian Agama adalah tentang belum adanya keseragaman dalam pemberian gelar. Hal ini berakibat pada munculnya variasi gelar hanya untuk satu kompetensi akademik yang sama. Sekedar contoh, Sarjana Teologi di UIN Sunan Kalijaga memiliki gelar S.Th.I (Sarjana Teologi Islam), hal ini berbeda jika dibandingkan dengan perguruan tinggi dari lembaga Kristen dan Katolik. Misalnya sarjana teologi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga diberikan gelar S.Th (Sarjana Teologi), bukan S.Th.K. Contoh lain misalnya sarjana pendidikan di Universitas Kristen Sanata Dharma tetap bergelar S.Pd sama halnya dengan alumni perguruan tinggi tidak berbasis agama, namun di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sarjana pendidikan diberikan gelar S.Pd.I. Masih ada beberapa gelar untuk keilmuan lain yang bernasib serupa. Oleh karena itu, perlu ada upaya penyeragaman agar *user* lebih mudah mengenali keahlian para lulusannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penataan gelar akademik di Indonesia sebenarnya sedang dilakukan. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Nomor 49 dan 87 Tahun 2014 disebutkan bahwa nama Program Studi harus menggambarkan bidang keilmuan (*body of knowledge*) yang benar, yang dicerminkan dalam rumusan Capaian Pembelajaran(CP) dari setiap Program Studi. Penetapan rumusan Capaian Pembelajaran yang benar sesuai dengan bidang keilmuan (*body of knowledge*) yang benar akan menjadi dasar penetapan predikat akreditasi Program Studi yang berbasis pada adanya bukti penulisan CP dan ketercapaian CP, serta dalam penentuan LAM yang akan mengakreditasi.

Selanjutnya, pada 2 Februari 2015 telah terbit Surat Edaran tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, dengan lampiran Keterangan Nomenklatur dan Singkatan Gelar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Riset dan Teknologi sudah berupaya memulai penataan ulang gelar akademik di Indonesia yang tentunya juga akan berimbas di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tulisan ini akan mencoba memaparkan beberapa hal, yaitu: 1) variasi gelar akademik yang ada saat ini, baik PTKI maupun di PTU, bahkan baik di dalam maupun di luar negeri, 2) mengidentifikasi tingkat keinginan dan kebutuhan, baik di kalangan akademisi PTKI maupun pemangku kebijakan akan kejelasan gelar akademik untuk konteks saat ini, 3) mengelaborasi secara teoretis keniscayaan gelar akademik yang kontekstual sesuai semangat kekinian.

Untuk dapat memaparkan beberapa poin tersebut, kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah filsafat ilmu kerangka teori utama tentang Saintifikasi?Pengilmuan Islam oleh Kuntowijoyo. Filsafat ilmu terutama digunakan sebagai analisis akhir (poin ketiga) untuk membingkai secara teoretis temuan-temuan yang di dapat dalam poin 1 dan 2. Adapun variasi gelar akademik, pengumpulan data mengandalkan dokumentasi, sedangkan untuk poin kedua yang memotret keinginan publik akademik, digunakan metode interview terhadap beberapa *key person* dan dilengkapi pula dengan sebuah survei sederhana dengan sample beberapa sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga.

Kajian ini dilakukan juga dilatarbelakangi oleh kurangnya sumber-sumber yang mengkaji gelar akademik di lingkungan PTKI. Belum ditemukan satu karyapun yang secara serius memaparkan kajian tentang polemik gelar akademik. Adapun karya di terkait gelar akademik di ranah internasional sudah ada beberapa. Terutama yang paling representatif adalah karya-karya dari Tony

---

<sup>1</sup>Surat no. 0404/E3.2/2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditandatangani oleh Direktur Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Illah Sailah, <http://Forlap.Dikti.Go.Id/Files/Download/Mw~~>

Becher sejak akhir era 1980an. Di antaranya karya Becher yang berjudul *"The Disciplinary Shaping of the Profession."* (1987) dan *Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of the Disciplines.* (1989). Penting pula untuk menyebut karya yang lebih klasik semisal Anthony Biglan (1973) *"The Characteristics of Subject Matter in Different Academic Areas"* dan *"Relationships between Subject Matter Characteristics and the Structure and Output of University Departments."* (1973) Karya yang lebih baru ditulis oleh Andrew Abbott dalam tulisannya berjudul *"Chaos of Disciplines"* tahun 2001.

Akhirnya, dengan kajian ini penulis berharap, nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan menyusun kebijakan pemberian gelar akademik di PTKI sesuai konteks saat ini. Kajian ini juga diharapkan dapat menyalurkan aspirasi sebagian insan akademik akan tuntutan perubahan gelar yang lebih marketable.

### **Gelar Akademik dalam Kungkungan Paradigma Islamisasi Ilmu Pengetahuan**

Melihat gelar akademik di PTKI secara sepintas sudah terkesan adanya upaya menyatukan keilmuan umum dengan ghirah keislaman. Ilmu umum yang dianggap lahir dari rahim sekuler disatukan dengan keilmuan Islam yang disinari wahyu Tuhan. Dengan harapan, ilmu yang sekuler tersebut menjadi 'terislamkan'. Oleh karena itu wajar jika kemudian gelar akademik di PTKI diidentikan dengan semangat Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan sebetulnya telah lama digaungkan oleh tokoh-tokoh awal dalam gelombang revivalisme Islam (Kebangkitan Kembali Islam) seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan seterusnya. Namun sebagai sebuah istilah yang ramai diperbincangkan, Islamisasi Ilmu Pengetahuan mulai menyeruak sejak Ismail Raji Al-Faruqi memelopori gerakannya. Dan kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Naquib Al-Attas, Abdul Hamid Abu Sulaiman, Sayyed Husein Nasr, Fazlur Rahman, dan Ziauddin Sardar.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan atau *Islamiyyat Al-Ma'rifat* atau *Islamization of Knowledge* diakui sebagai sebuah upaya mengembalikan ilmu pengetahuan pada pusatnya yaitu "tauhid". Hal ini dimaksudkan agar ada koherensi antara ilmu pengetahuan dengan iman. Gagasan islamisasi yang digulirkan al-Faruqi tampaknya dimotivasi oleh kegelisahannya saat melihat ilmu pengetahuan Barat yang semakin sekuler. Menurut Faisal Ismail, kegelisahan Al-Faruqi dipicu salah satunya oleh separasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler yang sudah lama terjadi yaitu sejak sekularisme dianut oleh masyarakat Barat sekitar abad ke-17 M. Sejak itu ihwal duniawi (termasuk ilmu pengetahuan umum/sekuler) dibedakan dan dipisahkan dari ihwal agamawi. Di sekolah Barat murid-murid dilarang berdoa di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai. Jika pun ada program studi agama (termasuk Islam) di universitas Barat, itu dimaksudkan sebagai kajian akademik murni dan tidak ada kaitannya dengan peningkatan ketakwaan dan penguatan iman. Kemajuan di bidang ilmu dan teknologi kedokteran misalnya banyak "disalahgunakan" untuk praktik aborsi dan euthanasia dalam masyarakat Barat. Berbagai fenomena di Barat itulah tampaknya yang menggerakkan al-Faruqi mencetuskan ide islamisasi ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Selain itu, Islamisasi Ilmu Pengetahuan, terutama untuk konteks Asia Tenggara, tidak lepas dari kiprah Muhammad Naquib Al-Attas, pendiri *Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC), Kuala Lumpur, Malaysia. Al-Attas melihat bahwa ilmu pengetahuan yang ada ini tidak bersifat netral, sehingga ilmu pun tidak dapat berdiri bebas nilai (*value-free*) akan tetapi syarat nilai (*value laden*).<sup>3</sup> Dia berpandangan bahwa ilmu yang ada saat ini sudah terbaratkan atau tersekulerkan. Pengetahuan dan ilmu yang tersebar sampai ke tengah masyarakat dunia, termasuk masyarakat Islam, telah diwarnai corak budaya dan peradaban Barat. Apa yang dirumuskan dan disebarkan adalah pengetahuan yang dituangi dengan watak dan kepribadian

---

<sup>2</sup>Faisal Ismail, Pro-Kontra Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Koran SINDO, Jum'at, 13 Februari 2015.

<sup>3</sup>Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), p. 134. Baca juga <http://inpasonline.com/new/islamisasi-ilmu-pengetahuan-menurut-syed-m-naquib-al-attas/>

peradaban Barat yang jauh dari Wahyu. Karena itu, al-Attas memandang bahwa peradaban Barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum diseleksi terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Kehidupan Barat yang sekuler telah menjadikan sains (ilmu pengetahuan) sebagai satu-satunya pengetahuan yang bersifat otentik yang hanya dikaitkan dengan fenomena semata. Kriteria untuk mengukur sebuah kebenaran juga hanya berpatokan pada rasio. Pandangan seperti itu muncul karena sains Barat tidak dibangun di atas wahyu. Namun dibangun di atas budaya yang diperkuat oleh spekulasi filosofis kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia, terus menerus berubah. Inilah yang dikritisi oleh Al-Attas. Pandangan tersebut menurutnya tidak sesuai dengan epistemologi Islam. Menurut al-Attas, pengetahuan Barat telah membawa kebingungan (*confusion*) dan skeptisisme (*skepticism*). Menurut Al-Attas, Peradaban Barat juga memandang keraguan sebagai suatu sarana epistemologis yang cukup baik dan istimewa untuk mengejar kebenaran.<sup>5</sup>

Dikotomi antara sains Barat dan Islam tidak mungkin diselaraskan karena terbentuk dari ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat, agama, doktrin, dan teologi yang bertentangan.<sup>6</sup> Pandangan hidup dalam Islam, menurut al-Attas, adalah visi mengenai realitas dan kebenaran (*the vision of reality and truth*). Realitas dan kebenaran dipahami dengan metode yang menyatukan (*tauhid*). Pandangan hidup Islam bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Substansi agama seperti keimanan dan pengalamannya, ibadahnya, doktrinnya serta sistem teologinya telah ada

---

<sup>4</sup>Abdullah Ahmad Na'im, dkk., *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), p. 338

<sup>5</sup>Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Terj. Karsidjo Djojosuwarno (Bandung: Pustaka, 1981), p. 195-196.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 197-198

dalam wahyu dan dijelaskan oleh Nabi.<sup>7</sup>Dengan demikian, sangat jauh berbeda antara pandangan hidup (*worldview*) yang dibawa oleh Barat dari nilai-nilai keislaman (*al-qiyam al-islamiyah*).Karena Barat mendasarkan segala sesuatunya dengan kecenderungan pada dikotomisme sedangkan Islam pada konsep tauhid. Dari situlah kemudian al-Attas mencoba untuk menggagas sebuah konsep islamisasi yang diharapkan dari konsep ini akan meng-counter peradaban Barat yang sekuler.<sup>8</sup>

Dengan paradigma yang demikian, sangat dapat dimaklumi mengapa dalam sejarah keilmuan Islam, termasuk di Indonesia, seolah ada gelombang untuk mengislamkan ilmu. Implikasi dari gelombang ini berimbas pula pada dunia pendidikan Islam baik dari aspek kurikulum dan pemberian gelar akademiknya. Gelar akademik di PTKI sangat jelas mencerminkan hal itu, dimana semua keilmuan Barat yang diajarkan di PTKI kemudian diolah sedemikian rupa dalam kurikulum, lalu menghasilkan output lulusan yang berkompentensi Ilmu Barat yang sudah terislamkan, sehingga layak menyandang gelar 'ganda', yaitu disipilin keilmuan tertentu plus atribut Islam.

Meskipun memiliki ghirah yang tinggi dalam menyatukan antara keilmuan dan keislaman, baik Ismail Raji al-faruqi dan Muhammad Naquib Al-Attas tampaknya masih terjebak pada dikotomi ilmu. Terutama dengan argumen historis yang menempatkan keilmuan Barat sebagai ilmu yang sama sekali tidak tersinari wahyu dan seolah-olah muncul tanpa campur tangan Ilahi. Hal inilah yang nantinya sedikit banyak akan dijawab oleh paradigma lain yaitu Pengilmuan Islam. Sebelum lebih jauh melihat bagaimana paradigma keilmuan Islam dapat berpenaruh terhadap gelar akademik,

---

<sup>7</sup>Adnin Armas, *Westernisasi dan Islamisasi Ilmu*, Islamia, THN II NO.6 (Juli-September, 2005), p.14.Tulisan ini telah dibukukan dan diterbitkan oleh Center for Islamic & Occidental Studis (CIOS) pada tahun 2007 dengan judul "Krisis Epistemologi dan Islamisasi Ilmu".

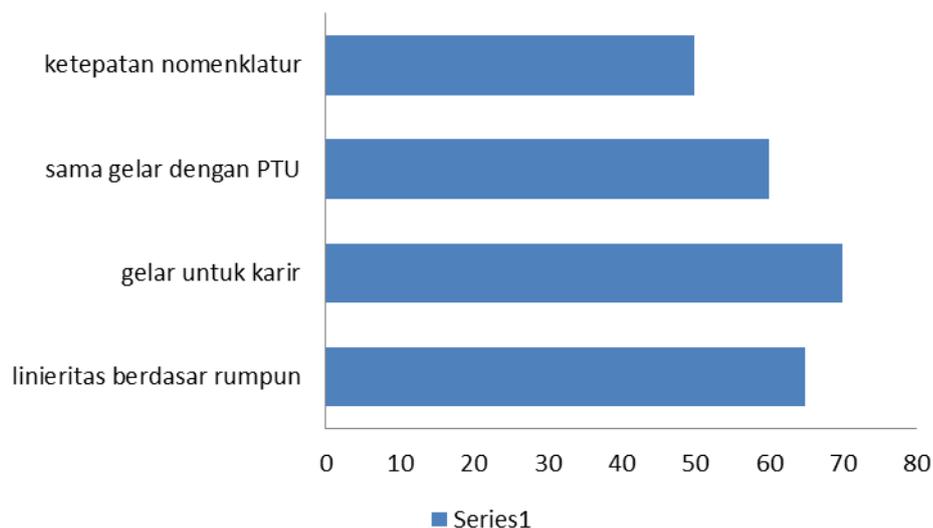
<sup>8</sup>Al-Attas membedakan konsep sekularisasi dan sekularisme. Sekularisasi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan terbuka di mana pandangan dunia (*worldview*) secara terus menerus di perbaharui sesuai dengan revolusi sejarah, sedangkan sekularisme memproyeksikan suatu pandangan dunia (*worldview*) yang tertutup dan seperangkat nilai yang mutlak, sejalan dengan tujuan akhir sejarah yang bermakna final bagi manusia. al-Attas, *Islam dan Sekularisme...*, hal. 21-22

terlebih dahulu dipaparkan realitas gelar akademik dalam konteks kekininian.

### Identifikasi Preferensi Gelar Akademik di PTKI

Untuk mengukur kecenderungan memilih (preferensi) terkait gelar akademik di PTKI, kajian ini melakukan survei sederhana di kalangan sivitas akademi UIN Sunan Kalijaga. Sampel diambil secara random baik di kalangan mahasiswa maupun alumni dengan jumlah responden 80 orang. Responden tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi.

Berdasarkan survei ini, dengan menggunakan skala Likert, didapatkan data bahwa sivitas akademik menilai nomenklatur gelar akademik yang berlaku di PTKI saat ini belum benar-benar tepat. Ketepatan nomenklatur gelar saat ini hanya memperoleh skor rata-rata 50 dari seluruh responden. Artinya mereka secara umum masih belum puas dengan nomenklatur yang ada saat ini.



Sebaliknya, ketika ditanyakan tentang kemungkinan untuk menyamakan antara gelar akademik di PTU dan PTKI maka responden memberikan nilai persetujuan yang cukup tinggi (60%). Pernyataan yg diungkap misalnya memberikan gelar S.Pd untuk lulusan Tarbiyah atau

Pendidikan Agama Islam. Hal ini menandakan adanya pengakuan bahwa gelar tanpa atribut agama dianggap lebih fleksibel atau menjanjikan.

Pandangan tersebut diperkuat pula dengan pengakuan bahwa gelar akademik sangat menentukan terhadap karir atau pasar kerja. Gelar yang lebih netral membuat lapangan pekerjaan terbuka lebih luas. Berbeda dengan gelar dengan atribut agama yang seolah-olah ruang gerakannya dibatasi untuk agama yang bersangkutan. Bahkan alumni bisa dianggap tidak kompeten untuk diberi tanggung jawab yang luas sebab keilmuannya hanya dari dan untuk agama tertentu. Dengan demikian karir lulusan dengan gelar akademik yang lebih netral, lebih menjanjikan di bursa kerja. Pandangan ini dibenarkan oleh responden dengan tingkat persetujuan hingga 70%.

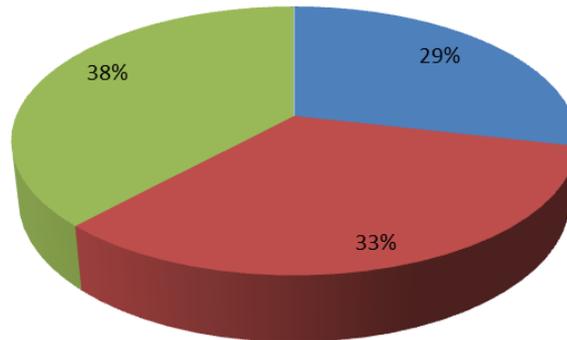
Temuan lain yang menarik adalah persetujuan responden tentang linieritas yang berbasis rumpun keilmuan, bukan berdasar program studi atau jurusan. Item pernyataan ini mendapat nilai persetujuan sebesar 65%. Pernyataan ini diajukan terutama karena sering munculnya keluhan di kalangan alumni yang terhambat melamar pekerjaan karena keilmuannya dianggap kurang linier antara S1 dan S2. Kurang liniernya studi lanjut tersebut juga disebabkan oleh belum adanya program magister yang betul-betul sama dengan program studi S1 sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menempuh studi pada program studi magister yang dianggap mendekati.

Dalam survei ini juga ditanyakan kemungkinan untuk kembali menggunakan gelar lama, yang dahulu dianggap cukup membanggakan bagi para penyandanginya. Misalnya gelar Doktorandus (Drs.) dan gelar Sarjana Agama (S.Ag). Gelar tersebut terkesan lebih luas dan tidak terlalu spesifik. Pada bagian ini kuesioner memberikan opsi jawaban semi terbuka dimana responden juga dapat memberikan masukan gelar akademik yang mereka usulkan, atau tetap sepakah dengan gelar akademik yang sedang digunakan saat ini, atau memilih kembali menggunakan gelar akademik model lama semisal S.Ag tersebut. Dari hasil rekapitulasi yang ada ditemukan kecenderungan yang cukup berimbang dari ketiga jenis kemungkinan tersebut.

### Chart.

#### Kecenderungan gelar yang diinginkan saat ini

■ gelar di masa lalu ■ gelar yang berlaku sekarang ■ gelar baru



Sebagian kecil responden (29%) sepakat untuk kembali menggunakan gelar model lama semisal S.Ag, sementara sebanyak 33% responden lebih memilih gelar yang sedang berlaku sekarang, dan sebanyak 38% responden menghendaki adanya gelar baru yang lebih sesuai. Dari kolom isian yang ditawarkan untuk diisi gelar baru, beberapa usulan muncul. Sekedar contoh, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama mengusulkan gelar S.AAg (Sarjana Agama-Agama), S.Rel (Sarjana Comparative Religion), S.Th (Sarjana Theologi – tanpa Islam), dan S.PA (Sarjana Perbandingan Agama).

Berdasarkan survei sederhana tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa insan akademik belum puas dengan gelar akademik yang berlaku saat ini dan mereka masih dalam pengharapan akan adanya perubahan gelar akademik yang kontekstual sesuai perubahan zaman, terutama agar gelar tersebut, meminjam istilah Nurcholish Madjid, memiliki *promise of job*, atau menjanjikan di pasar kerja. Andaiapun tidak memiliki spesifikasi profesi yang jelas, setidaknya gelar jangan sampai menjadi titik lemah yang justru membatasi ruang gerak seorang lulusan.

#### **Gelar Akademik di Luar PTKI: Sebuah Komparasi**

Beberapa perguruan tinggi berbasis agama non-Islam tampak telah menggunakan gelar akademik yang lebih netral dan tidak melekatkan atribut agama pada gelar akademik lulusannya. Misalnya Sarjana Pendidikan dari universitas Kristen tidak lantas memberikan gelar S.Pd.K (Sarjana Pendidikan Kristen) sebagaimana PTKI memberikan gelar S.Pd.I. Perguruan Tinggi Kristen justru memberikan gelar yang netral (S.Pd.) saja agar sama dengan Perguruan Tinggi Umum yang tidak berbasis Agama. Demikian pula untuk jurusan-jurusan lain, gelar akademik juga diberikan secara netral misalnya S.E (Sarjana Ekonomi), SH (Sarjana Hukum), S.Th (Sarjana Theologi), dan seterusnya. Berbeda dengan PTKI yang di antaranya masih mempertahankan gelar S.H.I (Sarjana Hukum Islam), S.Th.I (Sarjana Theologi Islam), S.Sos.I (Sarjana Sosial Islam), S.Kom.I (Sarjana Komunikasi Islam), dan seterusnya. Beberapa perguruan Tinggi Kristen yang sudah menggunakan gelar akademik yang netral di antaranya Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Univeristas Atmajaya, Universitas Kristen Satya Wacana (Salatiga), Universitas Kristen Maranatha, dan masih ada beberapa universitas Kristen lainnya.

Di Perguruan Tinggi Umum (PTU), penggunaan gelar diseragamkan dengan panduan yang jelas. Dalam contoh tabel berikut dapat dilihat bahwa gelar akademik yang sama, yaitu Ahli Madya Teknik (A.Md.T) digunakan untuk banyak prodi sekaligus, baik prodi Perancangan Mesin Perkakas, Perancangan Mekanik, Teknologi Manufaktur, Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi, Otomasi Sistem Permesinan, hingga Teknik Manufaktur Industri Agro.

#### Tabel

#### Contoh Penggunaan Gelar berbasis Rumpun di PTU

Perancangan Manufaktur	Manufacturing Design	D4	S.Tr.	T.
Teknologi Perancangan Mesin Perkakas	Machine Tools Design Technology	D3	A.Md.	T.
Teknologi Perancangan Perkakas Presisi	Precision Tools Design Technology	D3	A.Md.	T.
Teknologi Perancangan Mekanik	Mechanical Design Technology	D3	A.Md.	T.
Teknologi Manufaktur (*)	Manufacturing Technology (*)	D3	A.Md.	T.
Rekayasa Teknologi Manufaktur	Manufacturing Engineering Technology	D4	S.Tr.	T.
Teknologi Pembuatan Mesin Perkakas	Machine Tools Manufacturing Technology	D3	A.Md.	T.
Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi	Precision Tools Manufacturing Technology	D3	A.Md.	T.
Otomasi Sistem Permesinan	Automated Machinery System	D3	A.Md.	T.
Teknik Manufaktur Industri Agro	Agroindustrial Manufacturing Technology	D3	A.Md.	T.

Dengan demikian yang menjadi acuan gelar adalah rumpun keilmuan, bukan program studi. Atau setidaknya, untuk jurusan yang memiliki sangat banyak prodi, maka penyebutan gelar berdasarkan jurusan juga cukup masuk akal. Jika dibandingkan dengan konteks PTKI, sama-sama dalam rumpun Jurusan Perbandingan Agama, baik prodi Sosiologi Agama dan Perbandingan Agama memiliki gelar sendiri-sendiri. demikian pula beberapa jurusan di fakultas lain. Oleh karenanya penting untuk menetapkan gelar akademik sesuai rumpun keilmuan saja, bukan sesuai jurusan atau program studi yang terlalu spesifik.

Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan harapan pemerintah sebagaimana tertuang dalam surat edaran 2 Februari 2015 yang menyatakan bahwa: “Meningat perubahan pada rumpun ilmu dan pertumbuhan yang sangat pesat dari ragamprogram studi, tidak dimungkinkan untuk memberikan singkatan gelar sesuai dengan ragamprogram studi, sehingga inisial gelar yang digunakan adalah berbasis kluster cabang ilmunya. Contoh: Teknik Kimia dan Teknik Pertanian tidak lagi diberikan insial T.K. dan T.P. tetapi hanya diberikan inisial gelar “T”. Keterangan lebih lanjut terkait dengan keahliannya yang spesifik dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)”

Saat ini PTU masih menggunakan gelar akademik yang sejauh ini sudah dikenal publik misalnya:

#### Daftar Gelar Akademik Di Perguruan Tinggi Umum Di Indonesia

Ahli Pratama (A.P.) - D1

Ahli Muda (A.Ma) - D2

Vokasi (D3)  
Ahli Madya (A.Md)  
Sarjana (S1) Sarjana Sastra (S.S)  
Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Sarjana Hukum (S.H)  
Sarjana Ilmu Politik (S.I.P)  
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)  
Sarjana Psikologi (S.Psi)  
Sarjana Kedokteran (S.Ked)  
Sarjana Kedokteran Gigi (S.K.G)  
Sarjana Pertanian (S.P)  
Sarjana Teknologi Pertanian (S.T.P)  
Sarjana Peternakan (S.Pt)  
Sarjana Perikanan (S.Pi)  
Sarjana Kehutanan (S.Hut)  
Sarjana Kedokteran Hewan (S.K.H)  
Sarjana Sains (S.Si)  
Sarjana Sains Terapan (S.ST)  
Sarjana Teknik (S.T)  
Sarjana Komputer (S.Kom)  
Sarjana Seni (S.Sn)  
Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Sarjana Agama (S.Ag)  
Sarjana Farmasi (S.Far/S.Farm)  
Sarjana Pariwisata (S.Par)  
Sarjana Ekonomi (S.E)  
Sarjana Arsitektur (S.Ars)  
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)  
Sarjana Antropologi (S.Ant)  
Sarjana Ilmu Administrasi (S.IA)  
Sarjana Filsafat (S.Fil)  
Sarjana Desain (S.Ds)  
Sarjana Keperawatan (S.Kep)

Gelar Magister (S2)  
Magister Sains Akuntansi (MSA)  
Magister Manajemen Sistem Informasi (MMSI)  
Magister Manajemen (MM) - Master of Management (MM)  
Master of System Electrical Engineering (MSEE)  
Master Humaniora (M.Hum)  
Magister Pendidikan (M.Pd)

Selain itu, Perguruan Tinggi Umum juga banyak yang menggunakan gelar-gelar yang berlaku di dunia internasional. Gelar-gelar tersebut biasanya diberikan untuk jenjang master dan terutama untuk program-program kelas

internasional. Di antara gelar internasional yang lazim ditemui di Indonesia di antaranya:

- Master of Art (M.A.)
- Master of Education (M.Ed)
- Master of Applied Linguistics (M.Appl Ling)
- Master of Management (M.Mgt)
- Master of Science (M.Si) - Master of Sains (M.Sc)
- Master of Engineering (M.Eng)
- Master of Computer Science (M.Comp. Sc)
- Master of Applied Science (M.App.Sc)
- Master of Business Administration (MBA)
- Master of Architecture (M.Arc)
- Master of System Industrial Engineering (MSIE)
- Master of Economic (M.Econ)

Gelar-gelar internasional tersebut sebetulnya tidak mengejutkan sebab banyak negara di dunia juga memberikan gelar-gelar internasional terutama di kampus-kampus ternama mereka yang sudah menuju ke level world class university. Sekedar tambahan, dapat dilihat bagaimana negara lain memberikan gelar akademik. Misalnya di India, Pakistan ditemukan gelar-gelar seperti: Bachelor of Arts (BA), Master of Arts (MA), Bachelor of Business Administration (BBA), Master Of Business Administration (MBA), Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Science (M.Sc.), Bachelor of Science in Information Technology (B.Sc.IT.), Master of Science in Information Technology (M.Sc.IT.), Bachelor of Engineering (B.E.), Bachelor of Technology (B.Tech), Bachelor of Engineering (B.E.), Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS), Bachelor of Dental Surgery (BDS), Bachelor of Computer Application (BCA), Master of Computer Application (MCA). Sedangkan di beberapa negara Timur Tengah, gelar yang paling dikenal adalah Lisains/ License (Lc) dan Bakalurius / Bachelor.

Kembali kepada gelar akademik di lingkungan PTU Indonesia, meskipun penggunaan gelar akademik di lingkungan PTU terkesan sudah *established* dan tidak bermasalah, namun ke depan, perubahan nomenklatur masih mungkin terjadi, setidaknya untuk kepentingan penertiban dan sebagai respon

perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya perubahan Nomenklatur Program Studi, menurut Kemendikbud sebenarnya memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

1. Memfasilitasi tumbuhnya keilmuan baru di Indonesia baik, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun oleh riset yang menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin.

2. Memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang-bidang baru yang dibutuhkan

oleh Indonesia dan masyarakat internasional melalui penyelenggaraan program studi akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang lebih beragam.

3. Meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional terhadap hasil pendidikan Indonesia dengan melalui peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan program studi sesuai dengan bidang keilmuannya dan nama program studi, serta jenjang dan jenis pendidikannya agar lulusan program studi di Indonesia dapat memperoleh pengakuan program studi yang setara oleh masyarakat internasional. Terdapat berbagai kasus dimana lulusan PT Indonesia tidak diakui karena nama program studi tidak dikenal atau dilaksanakan pada jenjang yang berbeda.

4. Meningkatkan mobilitas mahasiswa dan lulusan oleh pemangku kepentingan nasional dan internasional melalui sosialisasi nama program studi yang diselenggarakan oleh PT beserta CP yang sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sehingga lebih dikenal oleh pengguna lulusan. Meningkatkan kerja sama dengan PT luar negeri dalam hal mobilitasi mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa dan penyelenggaraan program gelar bersama atau gelar ganda, dst. yang membutuhkan kejelasan capaian pembelajaran lulusan dan standar isi program studi.

6. Mempromosikan berbagai program studi yang diselenggarakan oleh PT di Indonesia dengan melengkapi nama program studi dengan istilah bahasa Inggris

7. Mempromosikan keilmuan khas Indonesia khususnya ilmu-ilmu di bidang seni, sejarah, bahasa, sastra yang sangat khas Indonesia dibandingkan dengan disiplin akademik yang berkembang di luar negeri.

8. Dengan adanya kode baru yang lebih terstruktur, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memetakan kekuatan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi berbasis pada program studi yang diselenggarakan di Indonesia

Oleh karena itu, agar penamaan gelar ini tidak terlalu problematis, sebenarnya juga telah ditetapkan bahwa gelar dan insial gelar disusun bersama Badan Bahasa dengan seoptimal mungkin menggunakan aturan penyingkatan yang baku, namun demikian Surat Edaran Dirjen Dikti No. 1030/D/T/2010 dan kebiasaan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat tetap dapat dijadikan pertimbangan. Yang jelas, Perguruan Tinggi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nama program studi yang diselenggarakan dan melakukan penyesuaian nama program studi yang masih belum tepat.

### **Gelar Akademik Dalam Semangat Pengilmuan Islam**

Dengan berbagai pertimbangan di atas, kiranya cukup beralasan untuk membawa diskursus gelar akademik ini ke dalam paradigma lain yang lebih sesuai untuk konteks zaman yang egaliter saat ini. Dengan kata lain, gelar akademik di PTKI yang selama ini lebih cenderung berparadigma Islamisasi Ilmu, perlu digeser ke arah pengilmuan Islam. Apalagi, pada dasarnya Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang digelindingkan Al-Faruqi dan Al-Attas dengan Pengilmuan Islam yang digaungkan oleh Kuntowijoyo memiliki persamaan fundamental, yaitu semangatnya untuk mengembalikan ilmu kepada muara Tauhid. Dalam gagasan Kuntowijoyo, tauhid dipandang sebagai *innate structuring capacity* karena mempunyai kekuatan membentuk struktur yang paling dalam. Sesudah itu ada *deep structure* yang meliputi akidah, akhlak, syariah dan muamalah baru kemudian hal-hal permukaan yang tampak dalam perilaku sehari-hari.<sup>9</sup>

Meskipun landasannya serupa, namun metode yang digunakan cukup berbeda. Metode yang digunakan Kuntowijoyo meliputi dua gerakan utama, yaitu Integralisasi dan Objektifikasi. Integralisasi ialah pengintegrasian

---

<sup>9</sup>Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006. Hlm. 33

kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu (al-Qur'an plus Sunnah) sedangkan Objektifikasi adalah menjadikan pengilmuan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Dengan metode integralisasi Kuntowijoyo ingin menegaskan bahwa sumber keilmuan itu tidak hanya dari rasio manusia (antroposentris) sebagaimana diprioritaskan dalam sejarah keilmuan Barat atau sumber wahyu tuhan (teosentris) sebagaimana dibela oleh agamawan, namun harus keduanya. Oleh karena itu, ilmu harus bersumber dari "teoantroposentrisme". Dengan landasan teoantroposentrisme, maka ilmu semestinya bergerak rujuk kembali atau dalam bahasa Kuntowijoyo disebut dediferensiasi. Hal ini penting sebab pada mulanya, terutama dalam sejarah Keemasan Islam, Ilmu dan Wahyu adalah satu kesatuan. Bahkan ketika keilmuan ditransfer dari Timur ke Barat, tranferensi tersebut masih dalam bentuk ilmu yang utuh menyatu. Menurut Hassan Hanafi tradisi Islam diboyong ke Barat ketika masih belum terjadi pemisahan yang jelas antara ilmu-ilmu yang ada dan ketika ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ilmu alam, matematika, dan ilmu humaniora masih bercampur.<sup>10</sup> Baru kemudian, pada akhir masa skolastik hingga munculnya masa Renaissance membuat keilmuan tersebut kian terpisah hingga terbentuk dikotomi yang masih terwarisi hingga saat ini. Oleh karena itu, dediferensiasi menghendaki keilmuan itu kembali rujuk dari perceraian yang panjang. Hanya dengan cara inilah akan terjadi integralisasi.

Rupanya, dalam konteks keilmuan di PTKI saat ini, semangat integralisasi sedemikian menggelora, lagi-lagi tercermin dari gelar akademik yang digunakan di lingkungan PTKI. Hal ini terutama, juga disebabkan oleh kemiripan integralisasi dan islamisasi ilmu pengetahuan yang memiliki kehendak yang sama dalam hal mempertemukan dua tradisi ilmu, sehingga gelombang ini sama-sama mengada tanpa terlalu terbedakan. Yang nantinya akan membedakan adalah tahap berikutnya yang ternyata hanya dimiliki

---

<sup>10</sup>Hassan Hanafi, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, Jakarta: Paramadina, 1999. Hlm. 243

oleh Pengilmuan Islam dan belum ditegaskan oleh Islamisasi Pengetahuan. Tahap lanjut yang dimaksud adalah Objektifikasi.

Objektifikasi diperlukan karena integralisasi saja tidaklah cukup. Integralisasi yang bertujuan menyatukan akal dan wahyu pada akhirnya harus berkembang menjadi integralisme, yaitu menyatunya manusia dan agama. Hal tersebut, menurut Kuntowijoyo hanya bisa terjadi jika dilakukan objektifikasi. Secara definitif, objektifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori obyektif.<sup>11</sup> Maksudnya adalah upaya membawa nilai-nilai Islam melalui pembawaan yang ilmiah sehingga bisa diterima secara wajar oleh umat lain (non-muslim) tanpa memandangnya sebagai perilaku keagamaan, sedangkan pelakunya (muslim) masih tetap bisa memandangnya sebagai perilaku agama. Dengan perkataan lain, dalam ranah keilmuan dan sosial, sebenarnya keislaman tidak harus ditunjukkan dengan simbol-simbol dan bahasa-bahasa agama, namun bisa ditebarkan dengan bahasa yang netral digunakan oleh semua orang. Yang paling penting adalah mentransfer nilai-nilainya atau intinya, bukan memasarkan kulitnya.

Dengan demikian, Gelar akademik dalam lingkungan PTKI sebetulnya tidak harus menonjolkan kulit, simbol, dan identitas, namun yang terpenting adalah muatan keilmuan yang diajarkan kepada mahasiswa mencakup kesemua aspek keilmuan yang integralistik. Dengan lain kata, gelar akademik di PTKI boleh sama dengan PTU, namun kompetensi keilmuan di PTKI harus punya nilai plus sesuai semangat integralisasi dan dediferensiasi. Sah-sah saja jika pada akhirnya PTKI memutuskan menggunakan gelar akademik yang sama dengan PTU. Hanya saja, untuk menggambarkan kompetensi plus yang dimiliki lulusan, maka Ijazah perlu disertai Surat Pendamping Ijazah yang menjelaskan kompetensi tersebut.

---

<sup>11</sup>Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006. Hlm. 61